

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) OLEH DINAS KOPERASI DAN UMKM
DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA**

Thio Agnes Siregar

NPP. 30.1446

Asdaf Kabupaten Jayapura Provinsi Papua

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: thioagnes45@gmail.com

ABSTRACT

Problems Statement/background (GAP): the author focuses on the conditions and circumstances in the implementation of MSME development policy implementation in Jayapura regency where MSMEs still experience many obstacles in developing their businesses. On the other hand, MSMEs have a major contribution in the country's economic growth. **Purpose:** The purpose of this study is to determine how the implementation of Micro, Small and medium enterprises development in Jayapura regency. **Method:** This study uses a qualitative approach with descriptive methods with The Theory of policy implementation model Van Meter and Van Horn (1975). Data collection technique is done by observation, interview (6 informants), and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that youth participation in planning is classified as sufficient, the implementation is classified as good, and the utilization of results is classified as good, although it is still constrained by the busyness of youth, and the level of awareness of some youth is still low. **Conclusion:** In the implementation of Micro, Small and medium enterprises (MSMEs) development policies in Jayapura regency, active participation of all stakeholders is needed; Micro, Small and medium enterprises (MSMEs) who want to develop businesses are usually constrained by Business Capital; the size and objectives of the policy have been met; resources are sufficient but human resources are still lacking; placement of policy implementers is on target; ; economic conditions encourage the implementation and social conditions of MSME actors are still not too utilizing technology. The supporting factor is the active role of the government in the implementation of the implementation. Inhibiting factors are rising prices of raw materials; human resources are still not creative; and limited capital of business actors. Implementation of small, micro, and medium enterprise (MSME) development policy implementation, it is necessary to develop a bottom-up policy concept to increase community participation in this case by MSME actors.

Keywords: policy; implementation; MSME

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada kondisi dan keadaan dalam penerapan implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Jayapura dimana UMKM masih mengalami banyak kendala dalam mengembangkan usahanya. Di sisi lain UMKM memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan perekonomian negara. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi pengembangan usaha mikro, kecil menengah di Kabupaten Jayapura. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teori model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara (6 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu partisipasi pemuda dalam perencanaan tergolong cukup, pada pelaksanaan tergolong baik, dan pemanfaatan hasil tergolong baik, meskipun masih terkendala dengan kesibukan pemuda, dan tingkat kesadaran beberapa pemuda yang masih rendah. **Kesimpulan:** dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Jayapura dibutuhkan peran serta aktif dari semua stakeholder; Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha biasanya terkendala pada modal usaha; Ukuran dan tujuan kebijakan telah terpenuhi; sumberdaya telah mencukupi namun sumberdaya manusia masih kurang; penempatan para pelaksana kebijakan tepat sasaran; koordinasi dan komunikasi terjalin baik dengan pihak lain; kondisi ekonomi mendorong pelaksanaan implementasi dan kondisi sosial pelaku UMKM masih belum terlalu memanfaatkan teknologi. Faktor pendukung yaitu peran pemerintah yang aktif dalam pelaksanaan implementasi. Faktor penghambat yaitu kenaikan harga bahan baku; sumber daya manusia yang masih belum kreatif; dan keterbatasan modal pelaku usaha. Pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), perlu dikembangkan konsep kebijakan bottom-up untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini para pelaku UMKM. **Kata kunci:** Kebijakan; Implementasi; UMKM

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian suatu negara yang berhasil terletak pada dorongan untuk bersaing baik itu. Pemerintahan yang baik adalah faktor akan sangat mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara, semua bagian pemerintahan harus bekerja sama dalam hal ini baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mempunyai peran masing-masing. Semua ini semata untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan umum.

Adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan, Menengah yang mengatur tentang UMKM ini membuktikan sangat bernilainya UMKM dalam memajukan ekonomi negara Indonesia. UMKM perlu diberdayakan dengan optimal dan terus-menerus dengan berbagai cara seperti akses pemasaran, fasilitasi pelatihan, fasilitasi modal, pengembangan usaha, perlindungan usaha, dan lain sebagainya. Semua ini perlu dilakukan agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang stabil.

UMKM yang memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi negara Indonesia ini harus dioptimalkan dalam pengembangannya sehingga mampu mengataasi masalah yang terjadi di negara, seperti pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah sebagai stakeholder pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan UMKM ini berperan besar untuk mengoptimalkan kinerja kebijakan ini. Dalam hal ini bukan saja pemberian fasilitasi kepada UMKM namun juga harus menjaga agar UMKM dapat bertahan dengan menjamin keamanan dan keberlangsungan usaha. Hal ini tercermin dari pentingnya peran dalam meningkatkan peluang usaha, kesempatan kerja dan ekspor, bahkan industri

dan bisnis lebih mampu menahan krisis ekonomi sebelumnya karena ketahanan dan penggunaan sumber daya lokal yang dapat diandalkan untuk mendukung ketahanan ekonomi.

Potensi sumber di yang dimanfaatkan dalam kegiatan perekonomian daerah yang di miliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura akan menjadi peluang besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jayapura. Sumber daya perairan yang memiliki potensi yang besar untuk dikelola dan dikembangkan. Hal ini disebabkan oleh letak strategis Danau Sentani di Kabupaten Jayapura. Jika potensi daerah ini dapat dikembangkan dengan baik maka dapat memberikan banyak manfaat seperti menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Menurut Kristianus (2019) Kelemahan yang ada pada pelaku industri yakni kualitas sumber daya manusia yang rendah, modal usaha sangat minim, volume produksi dan pangsa pasar sempit, lokasi usaha kurang strategis serta teknologi produksi yang digunakaman masih manual (Kristianus 2019). Hal ini menimbulkan permasalahan dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Jayapura. Sedangkan dalam perkembangannya jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Jayapura semakin meningkat pesat setiap tahun berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura tahun 2022 menunjukkan bahwa dalam kurun 5 tahun terakhir jumlah pelaku UMKM megalami peningkatan yaitu pada tahun 2019 sebanyak 3.613 UMKM; tahun 2018 sebanyak 2.900 UMKM; tahun 2019 sebanyak 3.981 UMKM; tahun 2020 sebanyak 4.314 UMKM; dan pada tahun 2021 sebanyak 5.654 UMKM dengan jenis usaha dengan jumlah tebanyak yaitu Usaha Mikro sejumlah 4.800; diikuti Usaha Kecil sejumlah 814; dan Usaha Menengah sejumlah 40 (Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura, 2022).

Berdasarkan data yang disajikan di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan UMKM di Kabupaten Jayapura mengalami peningkatan setiap tahun. Pertumbuhan paling pesat adalah pada tahun 2019 ke tahun 2021 yang jumlah UMKM mengalami peningkatan drastis dari angka 4.314 naik sampai menyentuh angka 5.654. Diketahui bahwa UMKM pada tahun tersebut bertambah sebanyak 1.340 UMKM. Dengan terus meningkatnya jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Jayapura maka dibutuhkan pula program-program pengembangan UMKM yang dapat meningkatkan ekonomi para pelaku UMKM tersebut sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja dan meminimalisir angka pengangguran.

Sejalan dengan program pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura menerima anggaran sebesar Rp 3 miliar dari dana Otonomi Khusus pada tahun 2022 untuk mewujudkan kemandirian ekonomi warga. (Leloltery, November 16, 2022). Dengan dana ini diharapkan mampu memabantu dalam program pengembangan UMKM di Kabupaten Jayapura.

Terkait pelaksanaan kebijakan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura yang dalam pelaksanaannya masih kurang optimal dan terdapat permasalahan. “Setidaknya tiga kendala yang dihadapi UMKM di Papua, yakni minimnya pelatihan, akses untuk pasar, dan pendanaan yang belum optimal” (Costa, Oktober 5, 2022).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti. Pada penelitian Saif Alhawariy, 2022 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro di Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Fokus penelitian ini adalah Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Disnakerperinkopukm. Hasil dari penelitian ini menemukan implementasi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dilakukan melalui kegiatan pendataan, peningkatan kualitas usahawan, memfasilitasi ke sumber pembiayaan, menyederhanakan

pelayanan perizinan dan memfasilitasi pemasaran. Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro memerlukan perbaikan dan peningkatan dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat yang ada, yaitu komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi (Saif Alhawariy, 2022). Penelitian Nurhaeni Jaya dkk, dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Keputusan (Library Research) yang berbeda dengan peneliti gunakan. Hasil dari penelitian ini menemukan implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu dalam konteks komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi, dan Struktur organisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu sudah cukup Baik. Dalam hal sudah cukup baik. Dalam mengimplementasikan program pemberdayaan memiliki faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi keberlangsungan pengimplementasikan program tersebut (Nurhaeni Jaya, dkk., 2021). Penelitian Putu Eka Purnamaningsih dkk, dalam Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2018 dengan judul “Implementasi Kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Denpasar (Studi Kasus Peningkatan Daya Saing UKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang sama dengan peneliti gunakan. Hasil dari penelitian ini menemukan implementasi kebijakan Dinas Koperasi dan UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Denpasar (Studi Kasus Peningkatan Daya Saing UKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN), masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan analisa pada 4 (empat) indikator implementasi kebijakan publik diantaranya kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh dinas kepada ukm-ukm yang ada di pasar-pasar dan desa-desa yang kurang mengetahui informasi mengenai program-program dari pemerintah (Putu Eka Purnamaningsih, dkk., 2018).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian Saif Alhawariy, 2022 perbedaannya adalah fokus penelitian dan lokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Disnakerperinkopukm. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nurhaeni Jaya dkk dan penelitian Putu Eka Purnamaningsih dkk terletak pada lokus penelitian serta program yang diteliti. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik badan pelaksana; sikap para pelaksana; komunikasi antar organisasi terkait; lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi dan keadaan dari implementasi kebijakan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

II. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti memilih pendekatan kualitatif berdasarkan fakta bahwa peneliti ingin memahami peristiwa yang terjadi atau peristiwa yang berhubungan langsung dengan yang diteliti melalui metode deskriptif. penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode deskriptif.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura, Kepala Bidang UMKM, serta 4 orang pelaku UMKM. Adapun analisisnya menggunakan menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik badan pelaksana; sikap para pelaksana; komunikasi antar organisasi terkait; lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi kebijakan pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Jayapura berdasarkan teori Van Meter Van Horn yang akan dijabarkan pada subbab di bawah ini.

3.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura Bapak Dr. Haryanto, S.IP., M.Si: “Implementasi kebijakan pengembangan UMKM ini telah berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Pada Tahun 2022 sudah 98% terealisasi sasaran yang ditetapkan. Program dan kegiatan terkait kebijakan pengembangan UMKM tahun 2022 telah berjalan dengan baik secara keseluruhan. Pelaku yang terpilih untuk menerima bantuan dan fasilitas merasa puas dengan kebijakan ini dan sebagian besar dari mereka dapat mengembangkan usahanya dengan baik berkat fasilitas dan bantuan dari Dinas Koperasi dan UMKM ini.”

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura Bapak Bernard Marthen Itaar: “Jangkauan pelayanan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sudah tepat sasaran dan sudah memenuhi skala prioritas yaitu seperti Orang Asli Papua (OAP) dan produk-produk lokal unggulan khas daerah.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan UMKM telah sesuai dengan ukuran dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan hal ini dibuktikan dengan berkembangnya UMKM di Kabupaten Jayapura dengan bantuan dan fasilitasi dan Dinas Koperasi dan UMKM. Dimana ukuran dan tujuan Dinas Koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan implementasi yaitu terfasilitasinya para pelaku usaha yang dalam proses perkembangannya dianggap kurang mampu, juga tersalurkannya bantuan yang diperlukan oleh para pelaku usaha.

3.2. Sumber Daya

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura Bapak Dr. Haryanto, S.IP., M.Si: “Mengacu pada banyaknya jumlah UMKM dan luas wilayah Kabupaten Jayapura maka ketersediaan pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Jayapura masih di bawah standar”

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura belum cukup sebagai pelaksana kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Jayapura yang memiliki luas daerah 17.517km² dan dengan jumlah UMKM keseluruhan 5.893.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura Bapak Bernard Marthen Itaar: “Perbedaan UMKM kebijakan pengembangan UMKM di Papua itu ada Dana OTSUS yang tidak ada di provinsi atau daerah lain. Dana ini yang dimanfaatkan untuk pengembangan UMKM khusus Orang Asli Papua (OAP). Untuk Dana OTSUS tahun 2022 sekitar 1M

lebih telah digunakan untuk memfasilitasi UMKM di Kabupaten Jayapura. Namun pada tahun 2022 karena masih dalam pandemi Covid-19 sehingga anggaran untuk pelaksanaan kebijakan pengembangan UMKM terbatas. Dana yang ada tidak cukup untuk memfasilitasi jumlah seluruh UMKM namun hanya sekitar 5% sampai 10%. Setiap anggaran yang diberikan tiap tahun dapat direalisasikan dengan baik”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sumberdaya anggaran yang ada, cukup diberdayakan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Jayapura, namun belum cukup untuk mendanai keseluruhan jumlah UMKM di Kabupaten Jayapura. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura Bapak Dr. Haryanto, S.IP., M.Si: “Setiap triwulan ada penilaian dan evaluasi setiap kegiatan pengembangan UMKM yang telah terlaksana”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura selalu memanfaatkan waktu dengan baik dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Jayapura. Mereka selalu mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang mereka lakukan, dengan evaluasi ini mereka dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan UMKM.

3.3. Karakteristik Agen/Badan Pelaksana

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura Bapak Dr. Haryanto, S.IP., M.Si: “Hubungan antar pegawai dan hubungan dengan pelaku UMKM sudah baik. Kami membuat tim khusus yang berasal dari staff bidang UMKM dalam setiap kegiatan dan program yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan UMKM di kabupaten Jayapura. Tim-tim ini pun sering turun ke kampung-kampung dalam pelaksanaan kebijakan. Kami juga membangun hubungan kerjasama dengan dinas lain terkait UMKM seperti dinas Perdagangan, dinas Perikanan, dinas Pemberdayaan Perempuan.”

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura Bapak Bernard Marthen Itaar: “Kinerja aparaturnya telah maksimal dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan UMKM. Tim yang dibentuk untuk mendukung program dan kegiatan terkait kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Jayapura. Pegawai antusias melaksanakan tugasnya dengan langsung turun ke lapangan menyalurkan bantuan ke pelaku UMKM di pelosok”

Dinas Koperasi dan UMKM menempatkan orang-orang yang tepat sasaran serta cocok dinilai ahli dibidangnya. Ada tugas pokok serta fungsi setiap pegawai dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM, agen pelaksanaannya terdiri dari Kepala Dinas selaku pemantauan jalannya kebijakan, perencanaan strategi dilakukan oleh bagian Kepala Bidang UMKM, pelaksanaan dijalankan oleh Kepala Seksi Fasilitasi UMKM dan Kepala Seksi Pembinaan UMKM yang memfasilitasi dan membina pelaku usaha secara langsung, sedangkan untuk manajemen administratif anggaran dilakukan oleh Bagian Keuangan dan Umum Agen pelaksana pada Dinas Koperasi dan UMKM menjalankan Program Prioritas Kabupaten Jayapura sehingga Kebijakan yang dijalankan oleh Kepala Dinas sejalan dengan program kerja UMKM.

3.4. Sikap (Disposition) Para Pelaksana

Menurut Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura mengatakan: “Kalau saya pribadi sebagai Kepala Bidang UMKM sangat mendukung kebijakan pengembangan UMKM karena dapat menjadikan UMKM di Kabupaten Jayapura naik level dan lebih maju. Yang saya rasakan banyak pelaku UMKM yang telah berkembang dari pelatihan dan bantuan yang telah kami fasilitasi”

Berdasarkan hasil observasi bahwa petugas pelaksana sangat bersemangat dan telah bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha agar kebijakan ini dapat terasa manfaatnya bagi sasaran kebijakan.

Disposisi dari pelaksana juga dapat dilihat dengan tidak adanya keluhan dari masyarakat terkait pelayanan fasilitasi dan bantuan dimana pelaku usaha sangat merasa puas terhadap sikap dari pelaksana terhadap pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, pelaku usaha sebagai target sasaran kebijakan juga mendukung terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Martha Ohee sebagai pelaku UMKM kerajinan kulit kayu mengatakan: “Saya bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM yakni berupa peralatan-peralatan yang membantu daya dalam proses pengerjaan kerajinan. Saya juga telah mengikuti banyak pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM sehingga ilmu yang saya dapatkan sangat bermanfaat di lapangan. Sebagai pelaku UMKM yang telah difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura saya telah menerima pelayanan yang baik dari Dinas tersebut dan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM sangat bermanfaat bagi usaha saya”

Sedangkan Ibu Kristin sebagai pelaku UMKM yakni penjual Dodoladi mengatakan: “Dodoladi merupakan produk olahan keladi yang merupakan hasil pertanian khas Papua yang sering dijumpai di pasar. Saya mengolah keladi menjadi dodol ini membutuhkan waktu yang panjang dan menguras tenaga karena saya hanya seorang ibu rumah tangga yang mengerjakan semuanya sendiri di rumah. Namun berkat bantuan dari Dinas Koperasi dan UMKM berupa kompor, alat memasak, dan alat pengaduk dodol, pekerjaan yang saya lakukan menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai. Saya juga puas dengan pelayanan dari Dinas Koperasi dan UMKM dimana saya selalu diikutkan dan dipanggil untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang menambah ilmu saya dalam berusaha”

Berdasarkan hasil tersebut, telah menunjukkan para pelaksana kebijakan telah menerima dan mengetahui tujuan kebijakan secara mendalam sehingga pelaksana kebijakan melaksanakan kebijakan tersebut dengan penuh tanggung jawab.

3.5. Komunikasi antar Organisasi dalam Aktivitas Pelaksanaan

Komunikasi antar organisasi dalam penelitian ini yaitu pada komunikasi yang terjalin antara Dinas Koperasi dan UMKM dengan DPMPTSP, Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan.

Dalam pelaksanaan perizinan berbasis OSS RBA komunikasi antara DPMPTSP dan Dinas Koperasi dan UMKM berjalan dengan baik. Komunikasi yang dilakukan dalam rangka bentuk pengawasan dan validasi terhadap izin usaha yang akan diterbitkan.

Dalam pemasaran produk-produk UMKM, Dinas Koperasi saling berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam penyelenggaraan Pameran produk-produk UMKM unggulan. Sebagaimana pernyataan dari kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM bahwa: “Koordinasi selama ini telah berjalan dengan baik antar organisasi lain terkait dengan kebijakan pengembangan UMKM itu sendiri. Dinas Koperasi dan UMKM tidak dapat berdiri sendiri dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan UMKM ini tentu berkoordinasi dengan pihak lain seperti DPMPTSP dalam pembuatan surat perijinan, begitu juga dengan BPOM, Dinas Perikanan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam penyelenggaraan Pameran.”

Komunikasi yang dilakukan juga sebagai upaya agar pelaku usaha yang secara umum berada pada naungan dari dinas koperasi dan usaha mikro dapat mensosialisasikan dan menarik pelaku usaha untuk mendukung kebijakan ini. Berdasarkan hasil wawancara di atas Dinas Koperasi dan UMKM telah menjalin komunikasi yang baik dengan pihak/organisasi lain dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan UMKM ini, sehingga dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini Dinas

Koperasi dan UMKM tidak berdiri sendiri melainkan saling bekerja sama dengan dinas lain terkait kebijakan pengembangan UMKM

3.6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Berdasarkan kondisi sosial di Kabupaten Jayapura terdapat hambatan bahwa secara umum masyarakat masih belum melek teknologi. Masih kurang dalam pemanfaatan teknologi dalam pengembangan usahanya atau dalam pemasaran produk-produk UMKM. Pernyataan ini dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Bapak Bernard Marthen Itaar bahwa: “Salah satu pemanfaatan IT dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan UMKM ini adalah pemasaran digital atau yang biasa disebut digital marketing. Untuk kaum awam tentu saja hal ini menjadi hal yang tidak biasa, namun bagi kelompok millennial yaitu para pengusaha muda mereka justru sangat familiar dengan IT dan lebih memanfaatkan IT dalam menjalankan usahanya. Kenyataan di lapangan mayoritas kaum awam atau berusia 30 tahun ke atas yang tidak paham IT dan masih menggunakan cara manual dalam pemasaran produk-produk mereka”

Sedangkan Ibu Anace selaku pelaku UMKM yakni penjual keripik pisang mengatakan: “Saya sudah berusaha keripik pisang dari 2008 sampai sekarang. Dari dulu hingga sekarang, saya biasanya menjual keripik pisang dengan mengantarkan atau menitipkan ke toko-toko yang sudah biasa menjadi langganan saya. Saya juga sudah mendapatkan beberapa bantuan dan mengikuti pelatihan-pelatihan dari Dinas Koperasi dan UMKM.”

Melihat kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Jayapura secara umum mayoritas usaha skala mikro kecil ini merupakan ibu rumah tangga yang berinisiatif berusaha untuk membantu penghasilan keluarga. Oleh sebab itu kawasan industri di Kabupaten Jayapura bukan kawasan industri besar yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Keadaan tersebut memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mendirikan usaha industri rumahan dengan skala usaha mikro kecil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM bahwa: “Mayoritas ibu-ibu rumah tangga yang menjadi pelaku UMKM ini ingin membantu suami dalam mendapatkan penghasilan tambahan. Mereka sangat bersemangat dalam berusaha dan kita memberikan dukungan kepada mereka. Umumnya mereka berjualan pinang dan makanan ringan, namun tidak sedikit juga yang berusaha dalam bidang kerajinan”

Sedangkan Ibu Baroroh pelaku UMKM yakni penjual keripik singkong mengatakan: “Saya berjualan keripik singkong yang saya olah sendiri di rumah tanpa karyawan. Modal dari saya berjualan keripik ini biasanya tidak banyak hanya sekitar Rp 200.000 sampai Rp 500.000. Untung yang saya dapatkan saya gunakan untuk membantu keuangan keluarga. Dari Dinas Koperasi dan UMKM sendiri sudah memberikan bantuan berupa peralatan masak yang sangat bermanfaat dalam usaha saya.”

Pelaku UMKM di Kabupaten Jayapura yang umumnya adalah ibu rumah tangga yang ingin memiliki pekerjaan sampingan biasanya berusaha kuliner atau makanan-makanan ringan. Usaha rumahan yang umumnya digeluti oleh ibu-ibu rumah tangga ini biasanya untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Oleh sebab itu kondisi ekonomi keluargalah yang biasanya menjadi motivasi untuk menjalankan usaha.

Kondisi eksternal pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Jayapura cukup mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Jayapura sebagaimana dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura, Bapak Bernard Marthen Itaar mengatakan: “Kondisi eksternal pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan UMKM ini cukup mendukung dengan adanya beberapa pelatihan dan pemasaran produk UMKM yang diadakan oleh pihak luar. Seperti pelatihan digital marketing yang diadakan oleh Whatsapp dan pameran produk UMKM lokal yang diadakan oleh Dinas Perikanan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan.”

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi eksternal juga berpengaruh terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Jayapura. Jika Kondisi eksternalnya mendukung maka UMKM juga akan semakin cepat maju dan berkembang karena banyak yang pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan UMKM ini

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Salah satu aspek penting dalam pengembangan UMKM adalah dengan memperlebar akses pemasaran lokal, nasional atau internasional. Hal ini diperlukan karena perkembangan jumlah UMKM yang terus meningkat begitu juga prodyktivitasnya. Akses pemasaran ini dapat berkembang melalui peningkatan standarisasi produk usaha, pembuatan kemasan menarik serta meningkatkan inovasi produk UMKM sehingga dapat bersaing di pasaran. Diperlukan peran aktif semua stakeholder baik pemerintah, BUMN & BUMD, perbankan, bahkan pelaku UMKM itu sendiri sehingga dapat meminimalisir kendala-kendala dalam pengembangan UMKM.

Pemerintah Kabupaten Jayapura memberikan ruang bagi para pelaku UMKM yang ingin memasarkan produk-produk mereka. Contohnya seperti pada saat pegelaran PON XX 2021 di Jayapura, pemerintah menyediakan stand/temapat untuk para pelaku UMKM untuk memasarkan produk-produknya

Selain itu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura juga memiliki galeri yang berisikan kerajinan-kerajinan dari pelaku UMKM yang akan dipasarkan di galeri tersebut. Akses pemasaran yang disediakan oleh pemerintah ini harapannya dapat meningkatkan penjualan dan mengembangkan UMKM di Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian ini sama didukung dengan hasil penelitian Saif Alhawariy 2021 bahwa fasilitasi pemasaran berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan sumberdaya manusia pada Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Jayapura mempengaruhi implementasi. Begitu pula dengan penelitian Nurhaeni Jaya dkk 2021 dan penelitian Putu Eka dkk 2018 yang menemukan hal yang sama yaitu terbatasnya sumberdaya manusia.

Pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya membutuhkan modal. Modal adalah faktor penting dalam menjalankan usaha, jika modal tidak mencukupi maka akan mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang maksimal bahkan tidak bisa mengembangkan usaha dengan baik.

Umumnya pelaku UMKM di Kabupaten Jayapura merupakan rakyat kecil yang bermodal kecil sedangkan tuntutan untuk mengembangkan usahanya membutuhkan modal yang besar.

Pemerintah Kabupaten Jayapura juga berupaya dalam hal akses modal bagi pelaku UMKM. mengorganisir dan memberikan kesadaran bagi pelaku UMKM agar dapat ikut serta dalam keanggotaan koperasi sehingga kendala dalam hal permodalan usaha dapat diatasi. Dinas Koperasi dan UMKM juga memberikan fasilitas bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan kredit di Bank dengan agunan kecil. memfasilitasi berbagai peralatan yang dibutuhkan pelaku UMKM dalam proses produksi, seperti kompor, wajan, tabung gas, blender, dan lain sebagainya. Segala bentuk bantuan di atas merupakan peran serta pemerintah sebagai pelaksana kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Jayapura.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu penghambat yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Jayapura adalah kenaikan harga bahan baku dalam pembuatan produk-produk UMKM. Harga bahan baku yang tinggi tentu akan mempengaruhi harga barang yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Ini mengakibatkan produk UMKM harus dijual dengan harga yang lebih tinggi. Jika produk dijual dengan harga yang lebih tinggi maka konsumen juga akan berpikir dua kali untuk membeli

produk tersebut. Itulah mengapa kenaikan harga bahan baku menjadi kendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan UMKM.

Sebagai pelaku usaha, dituntut harus memiliki kreatifitas yang tinggi dalam menciptakan produk-produk unggulan yang dapat laku di pasaran. Kenyataan di lapangan masih banyak pelaku UMKM yang masih belum mengembangkan kreatifitas mereka dalam berusaha. Umumnya keterampilan mereka dalam berusaha adalah ilmu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sedangkan Kabupaten Jayapura merupakan daerah yang unggul dengan hasil pertanian dan perikanan yang dapat dikembangkan. Inilah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Jayapura.

IV. KESIMPULAN

Dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Jayapura dibutuhkan peran serta aktif dari semua stakeholder; Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha biasanya terkendala pada modal usaha; Ukuran dan tujuan kebijakan telah terpenuhi; sumberdaya telah mencukupi namun sumberdaya manusia masih kurang; penempatan para pelaksana kebijakan tepat sasaran; koordinasi dan komunikasi terjalin baik dengan pihak lain; kondisi ekonomi mendorong pelaksanaan implementasi dan kondisi sosial pelaku UMKM masih belum terlalu memanfaatkan teknologi. Faktor pendukung yaitu peran pemerintah yang aktif dalam pelaksanaan implementasi. Faktor penghambat yaitu kenaikan harga bahan baku; sumber daya manusia yang masih belum kreatif; dan keterbatasan modal pelaku usaha. Pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), perlu dikembangkan konsep kebijakan bottom-up untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini para pelaku UMKM.

Keterbatasan Penelitian. Selama penelitian ini berlangsung, peneliti menyadari bahwa terdapat keterbatasan waktu dan biaya dalam pelaksanaannya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari betapa pentingnya penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program-program pengembangan UMKM di Kabupaten Jayapura agar dapat menjadi acuan untuk perbaikan-perbaikan program ataupun kebijakan kedepan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Luankali, B. (2007). *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 23rd ed. Bandung.
- Van Meter, D. S, & Van Horn, C. E. 1975. *The Policy Implementation process: A Conceptual Framework*. *Administration and Society*, 6(4). Pp: 445-448.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern

C. Jurnal

Alhawariy, Saif. (2021). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro di Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus. *Jurnal Administrasi Publik*.

Hiktaop, Kristianus & Kalakmabin, O. (2019). Strategi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Masyarakat Adat Bhuyakha Di Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura). *Musamus Accounting Journal*.

Jaya, Nurhaeni, Cahyo Sasmito, Roro Merry C Wulandari. (2021). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Sosial dan Politik*.

Purwaningsih, Putu Eka & I Ketut Winaya. (2018). Implementasi Kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Denpasar (Studi Kasus Peningkatan Daya Saing UKM dalam Mengahdapi Masyarakat Ekonomi Asean). *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*.

D. Internet dan Sumber Lainnya

Costa, Fabio Maria Lopes. 2022. "Pelaku UMKM di Papua Masih Terbentur Sejumlah Kendala." Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/10/05/pelaku-umkm-di-papua-masih-terbentur-sejumlah-kendala/>(Agustus 29, 2022).

Leloltery Ardiles. 2022. "Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura dapat Dana Otsus Papua Rp3miliar" Papua.antaranews.com. <https://papua.antaranews.com/berita/692445/dinas-koperasi-dan-umkm-kabupaten-jayapura-dapat-dana-otsus-papua-rp3-miliar/>(Oktober 15, 2022).

Data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura Tahun 2022